

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana atau yang sering disebut dengan delik, berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menterjemahkan delik sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹²

Terjemahan Moeljanto terkait istilah *strafbaar feit* yang merupakan perbuatan pidana. Beliau berpendapat mengenai istilah “perbuatan pidana” yang menunjuk kepada makna kelakuan manusia yang menimbulkan akibat serta dilarang oleh hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Diartikan demikian karena kata “perbuatan” merupakan hasil dari perbuatan manusia.¹³

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar secara *yuridis*, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara *yuridis* formal, tindak kejahatan merupakan bagian dari bentuk tingkah laku yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-

¹² Teguh Prastyo, **Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.47.

¹³ *Ibid*, hlm.48.

Undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana atau sanksi yang tegas.¹⁴

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, serta memiliki akibat hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁵

Penjabaran dari Simons yang dikutip oleh Moeljanto bahwa *strafbaar feit* adalah setiap kelakuan atau tingkah laku yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan seringkali dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan memiliki jabatan tinggi.¹⁶ Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan diri sipelaku, yaitu segala sesuatu yang sebelum pelaksanaannya telah ada niat dihatinya.
- b. Obyektif adalah suatu tindakan yang memiliki unsur-unsur yang pada diri sipelaku atau berhubungan dengan keadaan, dimana keadaan tersebut memaksa sipelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁷

¹⁴ P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.7.

¹⁵ Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22.

¹⁶ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.56.

¹⁷ *Ibid*, hlm.69.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis dengan dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembagian tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran” merupakan dasar bagi pembagian KUHP yang dimuat dalam Buku ke II dan Buku ke III bagi seluruh sistem hukum pidana.

b) Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu, tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang merumuskan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh si petindak. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Tindak Pidana materiil merupakan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh si petindak.

c) Menurut bentuk kesalahan

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Sedangkan Tindak Pidana tidak sengaja, misalnya Pasal 359 KUHP tentang pembunuhan.

d) Tindak pidana commisionis, tindak pidana ommisionis, serta tindak pidana commisionis per ommisionis commisa.

- i. Tindak pidana commisionis merupakan pelanggaran terhadap larangan. Misalnya: pencurian, pembunuhan, perkosaan, penggelapan, dan penipuan.
- ii. Tindak pidana ommisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah. Misalnya: tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak memberikan pertolongan apapun pada orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP).¹⁸
- iii. Tindak pidana commisionis per ommisionis commisa merupakan pelanggaran terhadap larangan. Misalnya: Seorang ibu secara sengaja membunuh anaknya dengan tidak memberikan ASI (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP), seorang penjaga yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan jurusan jalan kereta api (Pasal 194 KUHP).

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Secara harfiah korupsi adalah perbuatan busuk, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tindakan yang dapat disuap, perbuatan amoral. Seperti halnya kehidupan yang buruk di dalam penjara yang sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam tindak pidana terjadi disana. Menurut *Black's Law Dictionary* korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan dengan hak-hak yang didapat dari

¹⁸ Masruchin Ruba'I, dkk, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 83.

pihak lain, menyalahgunakan jabatannya atau untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Korupsi dalam kamus lengkap *Webster's Third New Internasional Dictionary* adalah ajakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.¹⁹ Menurut KBBI korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan dan penerimaan sogok. Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadinya.

Korupsi dalam Kamus Ilmiah Populer adalah pengertian kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, serta pemalsuan. Beberapa pengertian korupsi, antara lain sebagai berikut²⁰:

- a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar.

Seorang yang berjiwa korup menganggap Kantor sebagai perusahaan dagang atau tempat dimana ia dapat melakukan perbuatannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

- b. Rumusan yang menekankan titik beratkan jabatan pemerintahan.

Seorang pejabat pemerintah dapat dikatakan korup apabila ia menerima uang untuk mendorong ia melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bisa dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

- c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

¹⁹ Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.31.

²⁰ I. G. M. Nurdjana, **Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.8-10.

Seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan mengharapkan imbalan uang atau hadiah yang dilarang oleh undang-undang.

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi.

Seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perlakuan istimewa bagi kepentingan si pemberi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut.

“Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut.

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan dalam delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi perbuatan

yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan masyarakat atau perseorangan. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Delik/Tindak Pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Delik/Tindak pidana penyuapan aktif maupun pasif.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dilakukan oleh subyek hukum dan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi tersebut harus segera ditangani secara serius dan untuk itu perlu ada pengembangan peraturan sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilihat dari sumbernya di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 16.
- b. Bersumber dari pasal-pasal dalam KUHP yang di tarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, Pasal 423, 425, dan 435 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibedakan menjadi lima antara lain.

- a. **Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi.**
 - i. Tindak Pidana Korupsi murni, yaitu suatu tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan

keuangan negara atau perekonomian negara, serta kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, antara lain dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- ii. Tindak Pidana Korupsi tidak murni ialah suatu tindak pidana korupsi mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak pidana korupsi

- i. Tindak Pidana Korupsi Umum.

Tipikor umum ialah segala bentuk tindak pidana korupsi yang kepada orang-orang yang berkualitas, tetapi ditujukan pada perorangan termasuk pula korporasi, yang dirumuskan dalam Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- ii. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Dan atau Penyelenggara Negara.

Tipikor pegawai negeri merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, terdapat dalam Pasal: 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

c. Atas Dasar Sumbernya

- i. Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada KUHP

Tindak Pidana Korupsi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rumusan tersebut berasal dari rumusan TPKUHP. Formula rumusannya berbeda dengan aslinya, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
- b) Tindak pidana korupsi yang merujuk pada pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam pasal 23 yang menarik tindak pidana pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 menjadi tindak pidana korupsi.
- ii. Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai Tindak Pidana Korupsi.
Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku / Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana.

i. Tindak pidana korupsi aktif / positif.

Tindak pidana korupsi yang rumusannya merupakan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil adalah perbuatan yang dalam pelaksanaannya diperlukan gerakan tubuh orang. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 220 KUHP, 231 KUHP, 421 KUHP, 422 KUHP, 429 KUHP, dan 430 KUHP.

ii. Tindak pidana korupsi pasif / negatif.

Tindak pidana yang unsurnya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana ini dibedakan menjadi Tindak Pidana pasif murni dan Tindak Pidana pasif yang tidak murni. Tindak Pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang hanya berfokus pada unsur perbuatannya. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni ialah tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut antara lain Pasal: 7 ayat (1) sub b, d, dan ayat (2), pasal 10 sub b, pasal 23 jo 231 KUHP, dan pasal 24.

e. Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara.

i. Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- ii. Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²¹

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

- a. Tindak pidana korupsi dengan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²²
- b. Tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²³
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²⁴
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²⁵
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²⁶
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²⁷

²¹ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 20-30.

²² Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²³ Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- g. Korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²⁸
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).²⁹
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³⁰
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji, pegawai negeri tersebut memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³¹
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³²
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau jabatan yang ada pada dirinya (Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³³
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³⁴

²⁸ Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁹ Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

³⁰ Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

³¹ Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

³² Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

³³ Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

³⁴ Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal: 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).³⁵

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan rumusan terletak pada kata “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Saat ini, pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat koruptor adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut.

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)”.

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 atau disingkat KAK ada empat macam tindak pidana korupsi dan akan di uraikan sebagai berikut:³⁶

- a. Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum dalam ketentuan Pasal 15, 16, dan 17.³⁷
- b. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah diatur dalam ketentuan Pasal 20.³⁸

³⁵ Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

³⁶ Fayusman Rifai, 2011, **Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi** (online), [Http://Fayusman-Rifai.Blogspot.Sg/2011/02/Bentuk-Bentuk-Tindak-Pidana-Korupsi.Html](http://Fayusman-Rifai.Blogspot.Sg/2011/02/Bentuk-Bentuk-Tindak-Pidana-Korupsi.Html), (20 Desember 2017).

³⁷ Pasal 15-17 Konvensi Anti Korupsi 2003.

³⁸ Pasal 20 Konvensi Anti Korupsi 2003.

- c. Tindak Pidana Korupsi Perdagangan Pengaruh diatur dalam ketentuan Pasal 18.³⁹

C. Kajian Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Ada dua istilah dari terjemahan Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai “bukti”, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Pertama adalah “*evidence*” dan yang kedua adalah “*proof*”. *Evidence* memiliki arti, yaitu suatu dasar yang mendukung keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu *proof* adalah proses evaluasi dari sebuah kesimpulan terhadap *evidence* dengan mengacu pada proses itu sendiri.⁴⁰

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah proses atau suatu cara tentang bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.⁴¹ Menurut Van Bummelen pembuktian adalah pemberian kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang:

- a. Apakah suatu hal yang terlihat itu sungguh-sungguh telah terjadi;
- b. Apa sebabnya demikian halnya.

Menurut Yahya Harahap⁴², pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan menurut undang-undang dengan

³⁹ Pasal 18 Konvensi Anti Korupsi 2003.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Penerbit Erlangga, Jakarta Timur, 2012, hlm.2.

⁴¹ Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3.

⁴² M. Yahya Harahap, **Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.273.

membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian di Indonesia sama dengan pembuktian yang ada di Belanda dan negara eropa kontinental yang lain, yaitu menganut keyakinan bahwa yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan melalui keputusan dewan juri adalah hakim, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara anglo saxon lainnya, juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebut yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin jalannya persidangan dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang saat ini dianut dalam Hukum Acara Pidana:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif atau *Positief Wettelijk Bewijstheorie*.

Pembuktian dapat dikatakan secara positif, karena di dalam menjalankan praktiknya hanya berpedoman pada Undang-Undang, yang berarti apabila telah terbukti suatu perbuatan tersebut dan telah sesuai dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak dapat dijadikan pedoman dalam berperkara. Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini menyingkirkan anggapan bahwa semua pertimbangan subjektif hakim mengikat secara ketat menurut peraturan pembuktian. Wirjono Prodjodikoro

menolak sistem pembuktian ini, karena hakim dapat menetapkan suatu kebenaran dengan cara menyatakan keyakinan yang dimilikinya.⁴³

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atau *Conviction Intime*.

Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuan terdakwa tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Teori ini, dapat digunakan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.⁴⁴ Teori ini secara tidak langsung memberi kebebasan kepada hakim, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya akan semakin kesulitan untuk melakukan pembelaan.

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis atau *Laconviction Raissonnee*.

Teori pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim pada batas tertentu. Dalam teori ini hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang bersalah berdasarkan keyakinannya dan dengan didasarkan pada pembuktian yang disertai dengan kesimpulan (*conclusie*). Teori ini disebut juga dengan pembuktian kebebasan karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan yang dapat menjerat terdakwa atas dasar keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Teori pembuktian jalan tengah ini dibagi menjadi dua, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Kedua teori ini sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim yang mendasari bahwa ia bersalah.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm.13.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.149.

Sedangkan perbedaannya ialah berdasarkan pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, tidak hanya didasarkan pada undang-undang, ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim namun menurut pilihannya sendiri, kemudian berpangkal tolak pada aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi harus diikuti dengan keyakinan hakim.

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negative *atau Negatief Wettelijk*.

Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan dan dipergunakan dalam hal penentuan penjatuhan pidana bagi seorang terdakwa berdasarkan dua alasan, pertama harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana hanya karena hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua jika ada aturan yang mengikat hakim harus ada patokan yang digunakan oleh hakim dalam melakukan peradilan.

D. Kajian Umum Tentang Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena⁴⁵:

⁴⁵ Pengertian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara;⁴⁶
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara.⁴⁷

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan sebagai berikut.

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Keuangan Negara dalam pasal diatas memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban Negara yang mencakup anggaran Negara. Sementara itu, dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban Negara untuk tahun yang bersangkutan. Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.⁴⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi sebagai berikut:

- a. adalah kurang dari harga beli atau modalnya,
- b. kurang dari modal,

⁴⁶ Rudy Satriyo Mukantardjo, **Pemahaman Terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi**, <http://tipikor99.wordpress.com/2008/11/17/pemahaman-uu-tindak-pidana-korupsi/>, diakses 21 Januari 2018.

⁴⁷ Emerson Yuntho, **Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tipikor**, ICW, Jakarta, 2014, hlm.21-22.

⁴⁸ Muhammad Djafar Saidi, **Hukum Keuangan Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.11.

- c. tidak mendapatkan manfaat.⁴⁹

Rumusan Kerugian Keuangan Negara apabila dikaitkan dengan pengertian rugi sebagai asal dari kata kerugian yang mengacu pada rumusan penjelasan alinea ke-3 menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut.

- a. Berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara;
- b. Berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara.⁵⁰

Dari rumusan tersebut, klasifikasi “kerugian keuangan negara” dapat dirumuskan dalam lima indikator, yaitu:

- a. Hilang/berkurangnya “hak penerimaan” keuangan negara,
- b. Timbul/bertambahnya “kewajiban pengeluaran” keuangan negara,
- c. Hilang/berkurangnya sesuatu baik berupa uang, barang atau benda yang dapat dijadikan milik negara dengan pelaksanaan “hak dan kewajiban” negara,
- d. Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang,
- e. Akibat perbuatan melawan hukum.⁵¹

⁴⁹ Pusat Bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.1186.

⁵⁰ Hernold Ferry, **Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm.15.

⁵¹ Hernold ferry, *loc.cit*, hlm.49.

Kerugian Keuangan Negara dapat terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap dana akan masuk dan akan keluar dari kas negara. Tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui penggelapan pajak, penggelapan Pengembalian Kerugian Negara dan penyelundupan. Tahap dana yang akan keluar dari kas negara, Kerugian terjadi akibat selisih harga yang berbeda dengan harga beli, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program.⁵²

⁵² Jawade Hafidz Arsyad, **Korupsi dalam Perspektif HAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.174.